

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN
DENGAN KEKERASAN DAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)



OLEH

IKA ABRIYANI RAHIM

B111 12 054

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN
DENGAN KEKERASAN DAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)

OLEH:

IKA ABRIYANI RAHIM

B111 12 054

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Serjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor:167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

**IKA ABRIYANI RAHIM
B111 12 054**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 1 Maret 2016 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris,



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : IKA ABRIYANI RAHIM

Nomor Induk : B 111 12 054

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERAMPASAN DENGAN KEKERASAN DAN
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA

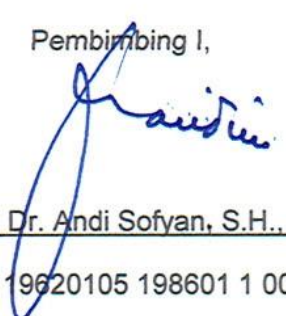
(Studi Kasus Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.

Anak/2015/Pn.Mks)

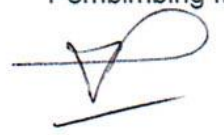
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Februari 2016

Pembimbing I,


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

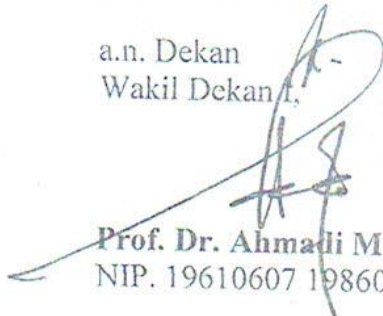
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **IKA ABRIYANI RAHIM**
No. Pokok : B111 12 054
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Ika Abriyani Rahim (B11112054), Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS), dibawah Bimbingan Bapak **Andi Sofyan**, Sebagai Pembimbing I dan Ibu **Hj. Haeranah** , Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan lokasi Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor. 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yakni Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai putusan subsider telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, hanya saja pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan cukup berat mengingat terdakwa adalah anak. Akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima

kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda ABD RAHIM dan Ibunda HJ. ROHANI, yang senantiasa memberi pengarahan dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka,
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H dan ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik Selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh civitas akademik yang turut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Mustari selaku staf Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dengan baik.
8. Terkasih BRIPDA M. RIDWAN RAHMAN dan Keluarga yang telah menjadi penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tak pernah lelah mendengarkan keluhan penulis hingga penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Tersayang buat sodara-sodaraku, RASTI, SRY, REZA, IKRAM, yang selalu mendukung dan mendoakan.
10. Sahabat-sahabatku terkhusus buat ERTINA SYAHRANI, DIAN PUSPITA ANGGRIANI, RADYAH, A.RESITA, DIAN AKHRIANI, SITI SARAH, ANDI RESKIANI dan ASWAR, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuanganku dalam penyusunan skripsi ini, SITTI FATIMAH, RIRIN PUSPITA SARI, WA ODE RINI ANGGRAENI yang senantiasa membantu dan saling member semangat satu sama lain, perjuangan kita akan terkenang sepanjang masa.
12. Keluarga posko KKN Desa Pacekke, Pak Rahmi sebagai Kepala Desa, Ibu Sida, Ambo, Kak Linda, Mitha, terima kasih atas doa, bantuan dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan KKN di Desa Paceeke.

13. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 90 Kab. Barru, Kec. Soppeng Riaja terkhusus Posko Desa Pacekke, Kak Ida, Ivan, Atto, dan Awi terima kasih atas kerjasamanya.

14. Rekan-rekan PETITUM 2012 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT yang membalas dan melipat gandakan amalnya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Pengertian Perampasan.....	14
C. Tindak Pidana Pemerkosaan	14
1. Pengertian Pemerkosaan.....	14
2. Unsur-unsur Pemerkosaan.....	15
D. Concursus / Perbarengan.....	20
1. Pengertian Concursus.....	20

2. Jenis-jenis Concursus	20
E. Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Pengertian Anak Nakal	25
3. Sistem Peradilan Pidana Anak	28
4. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Anak	29
5. Pertanggungjawaban Pidana Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Dan Sumber Data.....	43
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
D. Tehnis Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian Kasus Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan	46
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama..	51
1. Posisi Kasus	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Analisa Penulis	56

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan .	59
1. Pertimbangan Hakim	59
2. Amar Putusan	61
3. Analisa Penulis	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "*Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat)*" tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan "Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (dasar hukum). Tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Demikian pula dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selain itu, tergegas pula dalam idealisme negara kita bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum, dimana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem Negara Indonesia.

Upaya pembentukan hukum di Indonesia merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan banyak dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil kumulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang dewasa ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kejahatan semakin meningkat.

Masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia masih ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya kegiatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan itu memang tidak bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena semua kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dan bahkan dapat terwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran

¹ Soerjono Soekanto, 1985. Kriminologi Suatu Pengantar. PT Ghalilea: Jakarta. Hlm. 34

hak asasi manusia yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan, baiknya dilihat dari perspektif etika dan agama. Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh setiap masyarakat beradab. Hanya orang yang tidak bermoral dan berakhlaklah yang masih toleransi dengan perbuatan pemerkosaan itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaku pemerkosaan disamakan dengan binatang.

Dalam sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana pemerkosaan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perseorangan, berkaitan dengan masalah pemerkosaan, maka pemerkosaan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pemerkosaan dalam masyarakat. Ironisnya kejahatan berupa pemerkosaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak mulai mengenal kehidupan, masa di mana terjadi proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa di mana seorang anak akan melewatkan waktunya untuk bermain, belajar, dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat berpotensi untuk dididik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan

produktif. Sebab, anak merupakan generasi yang merupakan aset bagi pembangunan suatu bangsa.

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Indonesia masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. Hal tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu terhadap anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus, Negara memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan

pelanggaran hukum. Landasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak.

Anak-anak yang melakukan kejahatan seperti pemerkosaan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, serta dengan mudahnya sekarang anak-anak mengakses situs-situs porno melalui internet dan menonton film-film porno dari kaset-kaset VCD yang sekarang telah banyak beredar dan diperjual-belikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu motif yang mendorong mereka melakukan kejahatan yaitu orang tua tidak mendidik dengan baik, kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal, konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional. Penyebab kejahatan seseorang juga dapat ditemukan

dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Penyebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat yang baik di masa yang akan datang bergantung dan diawali pada perilaku anak-anak sekarang sebagai generasi penerus. Anak-anak yang baik dalam perilaku sangat menunjang terbentuknya sistem sosial masyarakat. Untuk itulah pihak penengak hukum berusaha terus-menerus untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan atau kesusilaan sehingga generasi ke generasi memandang tindak pidana tersebut sebagai gejala sosial yang buruk yang tidak dapat diterima oleh budaya manapun.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik menjadikan **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Mks)** sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara

bersama-sama sesuai Putusan Nomor:
167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.

Adapun manfaat penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS) adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut masalah penanganan tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan.
2. Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana dan proses peradilan tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan serta cara pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Ada beberapa pakar, dalam menyebutkan kata “tindak pidana” menggunakan istilah-istilah lain, seperti delik (*delictum*), perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum* dan Dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang (pidana).”²

Dalam Bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yakni : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut :

Strafbaarfeit adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”⁴

² Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 72, hlm.88.

³ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta, hlm. 19.

⁴ Ibid., hlm 19.

Pompe memberikan definisi *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.⁶

Menurut Simons, berpendapat bahwa pengertian *Strafbaarfeit* adalah Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁷

Dari beberapa rumusan tentang tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua aliran yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Aliran Monistis

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang

⁵ Ibid., hlm. 20.

⁶Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika :Jakarta, hlm.7

⁷ Ibid., hlm. 8.

(*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2. Aliran Dualistis

Berbeda dengan pandangan monisti yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.⁸

Menurut Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Unsur-unsur subjektif suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus* atau *culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁸ Amir Ilyas, op.cit., hlm.38,40

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁹

H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu :

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nêlaten*);
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam *delict* selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam *delict formil*, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam *delict materiel*;
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sebagai (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbédachteraad*).¹⁰

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan

⁹ Leden Marpauang, op.cit., hlm. 10-11

¹⁰ Frans Maramis, 2012. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 68-69

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹

Selain berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, yang pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif, Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia itu baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.¹³

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formiil.

Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan

demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh

masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

¹¹Amir Ilyas, op.cit., hlm 46

¹²Ibid., hlm 47

¹³Ibid., hlm. 48

Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

B. Pengertian Perampasan

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang dimana dilakukan dengan upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang lain, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya.

C. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika dan agama maupun hukum. Terkhususnya dari perspektif hukum mengingat Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak yang di timbulkan.

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara dalam undang-undang karena telah melakukan suatu kejahatan terhadap kesopanan yaitu melakukan suatu pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya, yang dimaksud dengan ancaman dalam ketentuan dari Pasal 285 yaitu agar perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi.

Pembuat Undang-Undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal sebaliknya terjadi pada seorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut.

2. Unsur-unsur Pemerkosaan.

Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subyek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subyeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan impoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita.

Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP.

b. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang yang diancam menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya, dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan yang mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam tersebut.

Dalam kasus pemerkosaan, biasanya pelaku dengan memegang sebilah badik kemudian badik tersebut di letakkan di leher seorang wanita, lalu pelaku berkata “jangan meronta, berikan mahkotamu kalau tidak berikan mahkotamu itu saya akan membunuhmu”. Dengan kata-kata ancaman itu yang disertai dengan alat sebilah badik, tentunya si korban/wanita tersebut tidak akan dapat berbuat apa-apa demi keselamatan jiwanya.

c. Memaksa

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah suatu yang merugikan si terpaksa.

d. Seorang wanita

unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhinya itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita antara lain:

- a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP)
- b. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)

- c. Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d. Wanita pada umumnya.

e. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Persetubuhan diartikan sebagai, tidak diperlukan keluarnya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosa).

Pasal 285 KUHP tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan juga timbulnya akibat berupa dimasukkan penis pelaku ke dalam vagina si wanita korban. Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut nyatanya telah terjadi.

D. Concurcus / Perbarengan

1. Pengertian Concurcus

istilah *samenloop* dalam Bahasa Belanda diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dalam berbagai istilah antara lain perbarengan dan gabungan tindak pidana. Perbarengan merupakan kebalikan dari penyertaan, yaitu kalau penyertaan satu tindak pidana dilakukan beberapa orang, maka perbarengan satu atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.¹⁴

Pengertian dasar dari perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua tindak pidana atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana yang lain berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa penanggulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

2. Jenis-jenis Concurcus

a. Concurcus Idealis (Pasal 63 KUHP)

Pasal 63 KUHP menyatakan:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah

¹⁴ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar; Bandung, hlm 183.

satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang membuat ancaman pidana pokok paling berat.

2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atas pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Criteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak,
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan system absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka

dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

c. **Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)**

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).¹⁵

E. Anak

1. Pengertian Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus,¹⁶ dan juga merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹⁷ Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perbaharuan dari Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak.

¹⁵ Ibid, hlm 187

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997

¹⁷ Bunadi Hidayat. 2010, pembedaan anak di bawah umur, PT. Alumni Bandung 2010. Bandung, , hlm. 2.

Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat 2 sampai 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa:

- Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.
- Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁸

Sedangkan pengertian anak juga di jelaskan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

a. Anak yang melakukan tindak pidana atau

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012

- b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. (Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau

¹⁹ Ketentuan umum undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002

menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 20 sebagai berikut :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak “.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.

2. Pengertian Anak Nakal

Istilah kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.²⁰

Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada priode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*,

²⁰ Wagiati Soetodjo. 2010, Hukum pidana anak, Refika aditama, Bandung. Hlm. 8-7.

terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency* ini, seperti diuraikan di bawah ini.

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut;

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya,
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam kemasyarakatan, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya,
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.²¹

Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Wagati Soetodjo yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, kejahatan/kanakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.²²

²¹ Bunadi Hidayat, op.cit, hlm. 17

²² Kartini Kartono, 1992. *Patologi Sosial 2, kenakalan remaja*. Rajawali : Jakarta, hlm. 20.

Maud A. Merrill merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut;

(Seorang anak digolongkan anak delikuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasikannya).²³

R. Kusumanto Setyonegoro dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut;

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. ²⁴

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah;

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, bagi menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak.

²³ Bunadi Hidayat, op.cit, hlm 19

²⁴ Ibid, hlm 20

²⁵ Penjelasan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada prinsipnya, sistem peradilan pidana anak sudah sesuai dengan ketentuan yuridis yang ada, misalnya; KUHP, KUHPA, SPPA, Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 06. UM. 06 Tahun 1987 tentang tata tertib sidang anak tanggal 17 November 1983, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 1987 tentang tata tertib sidang anak dan ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan pemidanaan anak di bawah umur.

Hal-hak yang prinsip dalam sistem peradilan tersebut adalah;

- a. Anak yang dapat diajukan ke persidangan anak adalah anak yang belum berusia 16 tahun (pasal 45 KUHP),
- b. Sidang diadakan secara tertutup untuk umum, tetapi pembacaan putusan dinyatakan terbuka untuk umum (pasal 153 ayat (3) KUHP jo. Pasal 10 ayat (2), (3) PERMENKEH No. 06. UM. 01. 06 Tahun 1983, tentang tata tertib sidang anak,
- c. Setiap jenis kasus pidana anak selalu dimintakan (litmas) dari Bapas,
- d. Sebelum pemeriksaan sidang pertama petugas Bapas menyerahkan hasil (litmas) kepada hakim dan jaksa,
- e. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dan diutamakan hakim wanita,
- f. Sidang dihadiri orang tua, jaksa dan petugas sosial (social worker) dari Balai Bipa (Bapas), tidak boleh diliput wartawan (pers),
- g. Hakim yang memimpin persidangan tidak menggunakan toga, demikian pula jaksa yang menghadiri persidangan juga tidak bertoga,
- h. Apabila dianggap perlu, hakim pemimpin sidang dapat meminta keterangan pada orang tua terdakwa dan petugas Bipa,
- i. Sidang peradilan anak diadakan dalam waktu (hari) tertentu/khusus,
- j. Terdakwa dapat didampingi pembela sejak dalam penyidikan hingga dalam pemeriksaan persidangan.

4. Pertimbangan hakim dalam pembedaan anak.

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaksud dalam dakwaan penuntut umum.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat menyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksud sekurang-kurangnya alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHP. Pasal 184 ayat (1) KUHP "menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa".

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa bersikap sopan dan berterus teran dipersidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda. Faktor yang memberatkan antara lain, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma, perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik korban sebagai seorang mahasiswa.

Faktor yang meringankan pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang dalam hal umur yang masih muda berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang merumuskan ;

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga”.²⁶

Faktor yang memberatkan yaitu penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan dalam hal *concursum*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan

²⁶ Laden Marpaung, op.cit, hlm. 113

terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertinganya.

Pasal 66 KUHP yang berbunyi;

- a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- b. Dalam hal pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kerungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

5. Pertanggungjawaban pidana anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak atau anak nakal dalam hal ini anak jalanan secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, yang menentukan sebagai berikut;

"Dalam hal ini penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah".²⁷

Namun keberadaan pasal 45 KUHP tersebut dengan diberlakukannya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²⁷ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45

telah dicabut, sehingga tidak dapat diberlakukan. Perihal perlunya anak nakal mendapatkan perlindungan hukum, tidak lepas dari upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut;

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan penindakan anak nakal.

Anak nakal dalam hal ini anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dikenakan sanksi pidana maupun

tindakan. Sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan bahwa:

“Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini dinyatakan pula, jika anak nakal tidak ditangani secara baik/tepat, tidak mustahil kondisinya di masa kini akan menjerumuskan menjadi penjahat (*adult crimimal*), di masa mendatang gejala yang serius dari ‘kenakalan anak’ dapat menjadi indikator bahwa, pelakunya berpotensi menjadi anak nakal”.²⁸

Perihal sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengajukan uji materil atas UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak penjatuhan pidana terhadap anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

- Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang pengadilan anak tidak ada perubahan.
- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;
 - a. Pidana penjara,
 - b. Pidana kurungan,
 - c. Pidana denda, atau
 - d. Pidana pengawasan.
- Pidana tambahan dapat dijatuhkan yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah).
- Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh,
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau

²⁸ Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 22

- c. Menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Penjatuhan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang diterapkan oleh Hakim.²⁹

Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada anak di dalam UU

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal

71 menyatakan bahwa :

- Pidana pokok bagi anak terdiri atas;
 - a. Pidana peringatan,
 - b. Pidana dengan syarat : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan,
 - c. Pelatihan kerja,
 - d. Peembinaan dalam lembaga,
 - e. Pidana penjara.
- Pidana tambahan terdiri atas;
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Jadi sanksi yang diberikan kepada anak nakal tersebut tidak hanya sanksi pidana penjara dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2011 melainkan ditambah dengan pidana kurungan.

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi suatu perbedaan penyelesaian terhadap anak nakal ditinjau dari UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2011 dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena ruang lingkup UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012 dalam

²⁹ Bunadi Hidayat, op.cit, hlm 27

kaitanya dengan penindakan terhadap anak nakal, sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak secara menyeluruh dalam arti suatu pencegahan agar orang tuanya memperhatikan anak-anaknya agar tidak menjadikan anak nakal. Jika anak nakal terbukti melakukan tindak pidana, perlakuan khusus perlu dilakukan terhadap anak agar anak tetap mampu mengembangkan jiwa, kepribadian dan sosialnya, penjara merupakan alternatif terakhir terhadap anak.

Anak yang melakukan perbuatan menyimpang atau anak yang melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan napza, dapat diajukan ke sidang pengadilan. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, menentukan sebagai berikut;

“Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Dan menurut Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan batas usia anak sebagai berikut;

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.

Mengenai perlakuan khusus terhadap anak nakal, nampak pada sidang pengadilan di mana para penengak hukum tidak

memakai toga atau pakaian dinas, dengan tujuan agar anak tidak merasa takut dan dia merasa dalam lingkungan keluarganya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa;

"Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas". Dalam pemeriksaan sidang pengadilan anak Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan;

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup,
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka,
3. Dalam sidang pengadilan yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh. Penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan dalam sidang tertutup tujuannya untuk melindungi kepentingan anak, agar anak-anak tidak dipublikasikan oleh pers, karena jika sampai identitas anak dan perkaranya dimuat pada media massa, maka akan menyebabkan trauma bagi anak dikemudian hari, dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan diri si anak yang pada akhirnya berakibat anak tersebut akan dikucilkan oleh teman-temannya.

Mengenai tatacara persidangan terhadap pelaku tindak pidana anak, Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 pengadilan anak menentukan:

1. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal,
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis,
3. Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitra atau seorang panitra pengganti.

Pemeriksaan sidang harus dilakukan secara terbuka, kecuali pemeriksaan sidang perkara anak dan hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan yang dilakukan secara tertutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP, menentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.

Meskipun sebagai anak nakal yang telah terbukti melakukan kesalahan, hak-hak anak tetap diperhatikan, dengan menempatkan anak dalam suatu lembaga permasyarakatan dalam arti anak dapat dijatuhi pidana penjara. Anak yang diletakkan dalam lembaga permasyarakatan tetap akan memperoleh pelayanan asuhan sebagaimana layaknya seorang anak. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menentukan bahwa;

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya,
2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Jadi meskipun berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, anak tersebut tetap memperoleh pelayanan dan asuhan. Pemberian pelayanan yang demikian bertujuan untuk menolong anak agar dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, untuk itu anak perlu dihindari dari tindak pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.³⁰

Perlakuan istimewa terhadap anak ini juga nampak dalam memeriksa perkara anak nakal, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan;

“Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Penjatuhan berupa tindakan tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan;

- Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;
- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan atau latihan kerja.

Perihal sanksi berupa pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari;

- a. Pidana pokok;
Pidana mati,
Pidana penjara,

³⁰ Darwan Prinst. 1997. Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-2.

- Pidana kurungan,
- Pidana denda.
- b. Pidana tambahan;
 - Pencabutan hak-hak tertentu,
 - Perampasan barang-barang tertentu,
 - Pengumuman putusan hakim.

Namun jika pelakunya seorang anak, maka sanksi berupa pidananya tertuang di dalam Pasal 23 (1), (2), dan (3) No. 3 Tahun 1997 menentukan;

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;
 - a. Pidana penjara,
 - b. Pidana kurungan,
 - c. Pidana denda, atau
 - d. Pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Perihal pidana pokok berupa pidana mati sebagaimana tertuang dalam KUHP tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sesuai dengan pasal 26 (2) UU No. 3 yang menentukan bahwa;

“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Anak nakal jika oleh hakim dalam putusannya tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, menunjukkan bahwa anak memperoleh perlindungan tersendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak-anak meskipun dalam putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara sebagaimana Pasal 37 Konvensi hak-hak anak, anak harus tetap memperoleh jaminan dan perlindungan sebagai berikut;

Negara-negara peserta menjamin bahwa;

- a. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak,
- b. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak hanya sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek,
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaanya.

Dengan demikian, meskipun seorang anak disangka atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, perhatian terhadap harkat dan martabat anak tetap diutamakan, sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (4) Konvensi Hak-hak anak, menentukan;

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana diperlukan sesuai martabat dan nilai-nilai anak, memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali atau reintegrasi anak dan meningkatkan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.
2. Berbagai pengaturan seperti pemeliharaan, pembinaan dan peraturan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin

bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Mengenai ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan sebagai berikut;

“Hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atas bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin harus dihindari”.

Perihal aspek perlindungan hukum terhadap anak, sistem hukum perlindungan anak masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak dan masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak.³¹

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa jika seorang anak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka dapat dikualifikasikan sebagai anak nakal. Meskipun sebagai anak nakal yaitu anak yang melakukan suatu perbuatan pidana seorang anak berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan pelaku tidak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perlakuan istimewa terutama dalam hal penjatuhan pidana, anak nakal diharapkan pidana yang dijatuhkan berupa tindakan jika anak dijatuhi pidana penjara, pidana yang dijatuhkan yaitu maksimal 1/3 dari pidana oleh orang dewasa. Terhadap orang tua

³¹ Muhammad Joni. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung. Cet, ke 5, hlm. 5.

yang kurang memperhatikan anak-anaknya sehingga menjadi anak nakal, kekuasaannya sebagai orang tua dicabut dengan alasan telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Meskipun demikian anak nakal tersebut diusahakan untuk tidak dijatuhi pidana penjara, sebagaimana Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 anak nakal hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal hanyalah merupakan alternatif terakhir.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak nakal menurut peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa apabila anak tersebut dalam persidangan tertutup terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, maka dapat dijelaskan bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta tindakan. Sedangkan tindakan dapat berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan objek penelitian adalah proses peradilan tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosan yang dilakukan secara bersama-sama.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan adanya kasus-kasus yang akan diteliti, maka peneliti memilih tempat di Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan adanya kasus, biaya transportasi mudah dijangkau, sehingga tidak menghambat masalah kuliah.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu;

- a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus ini.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

- a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya

C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut;

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan,

majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu;

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

D. TEHNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian

data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar banyak data yang penulis dapat rangkum dari perumusan masalah yaitu;

A. Hasil Penelitian Kasus Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan

Tindak pidana terhadap kesusilaan yang didahului merampas hak milik korban khususnya perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana yang mana pada dasarnya setiap perbuatan sudah diatur di dalam undang-undang, baik berupa aturan maupun penjatuhan pidananya sama halnya dengan judul skripsi yang penulis angkat sebagai salah satu syarat penyelesaian studi sarjana hukum, yaitu Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Putusan Nomor : 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS). Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat selain tindak pidana pemerasan juga melakukan suatu tindakan yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya dalam hal ini adalah tindak pidana pemerkosaan yang tidak lazim jika dilakukan oleh seorang anak yang

berusia 15 tahun dalam kasus perampasan dengan kekerasan dan pemerkosan, apabila di lihat dari segi umur masih merupakan anak dibawah umur dimana telah dijelaskan pengertian anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dalam kasus ini kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa sama halnya terdakwa dalam kasus putusan nomor : 167/Pid.Sus.Anak/2015 yaitu FADLI Bin Rahman. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak dijelaskan tentang penjelasan mengenai anak yang melakukan tindak pidana yakni Pasal 1 Ayat (2), (3) bahwa :

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

Kejahatan anak atau dilinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam *title* khusus dari bagian Kitab

³² Penjelasan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Hukum Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinkuensi anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan hukum. Dalam teori yang di dalamnya menterjemahkan tentang kejahatan, bahwasanya suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada di dalam masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi, sehingga dari kurangnya kebutuhan ekonomi dapat menumbuhkan sifat kekurangan dan berdampak pada kejahatan seseorang yang berusaha mencapai cita-citanya dengan melanggar Undang-Undang.

Tindak pidana perampasan dengan kekerasan dan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini merupakan suatu perbarengan atau gabungan tindak pidana yaitu terjadinya dua tindak pidana atau lebih yang dilakukan oleh satu orang. Kasus tindak pidana ini dilakukan oleh tiga orang pelaku secara bersama-sama yakni FADLI Bin RAHMAN bersama dua rekannya yang diajukan ke sidang pengadilan dengan berkas perkara terpisah. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didahulukan dengan cara kekerasan lalu timbul motif melakukan perampasan dan pemerkosaan. Dimana perampasan berarti mengambil secara paksa milik orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan cara kekerasan, sembunyi-sembunyi.

Di dalam surat putusan terdakwa FADLI Bin Rahman telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yakni menerangkan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Selanjutnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus perkara putusan nomor : 167/Pid.Sus.Anak/2015, juga melakukan suatu perbuatan asusila yaitu pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari persepektif etika dan agama maupun hukum terkhususnya dari persepektif hukum mengingat Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak yang di timbulkan.

Dalam putusan perkara pidana anak Nomor : 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS, hakim telah memutuskan penjatuhan pidana terhadap anak dalam kasus perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan karna telah terbukti secara sah dan

menyakinkan juga telah terpenuhinya setiap unsur-unsur perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP yang dimana ini merupakan concursus idealis yaitu dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan tetapi hanya satu pidana yang dapat dijatuhkan yakni pidana pokok yang paling tinggi. Dari hasil wawancara oleh salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar, ibu R. Bernadette Samosir pada tanggal 2 Februari 2015, 11.00 WITA hakim telah menetapkan bahwa dalam kasus ini anak sebagai pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tahun), kasus ini bersifat kumulatif yang dimana penggabungan antara dua tindak pidana yang dilakukan dalam satu waktu.

Hukum pidana materil merupakan syarat utama bagi hakim dalam menjatuhkan pembedaan. Salah satu faktor yang menguatkan pertimbangan hakim dilihat dari fakta persidangan ditambah dengan keterangan para saksi. Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari yang namanya suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak keluar dari pasal-pasal dan penjatuhan pidana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang.

Dalam hal perkara pidana anak ini sangat dibutuhkan peran serta orang tua atau keluarga dalam memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap anaknya.

B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No. 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa FADLI Bin RAHMAN bersama-sama dengan saksi RIFAL dan saksi MUH.RESKI. Pada hari senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jl. Urip Sumohardjo Makassar tepatnya dibawah jembatan samping wisma Benhil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya yaitu Pr. HASTUTI untuk bersetubuh dengannya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika sanksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, dimana selanjutnya saksi RIFAL menghentikan sepeda motor saksi korban lalu terdakwa menutup wajah saksi korban dengan menggunakan baju terdakwa, selanjutnya saksi RIFAL mengambil Hand Phone milik saksi korban begitupun Hand Phone yang berada di saku baju saksi korban sedang RESKI mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban. Bahwa setelah itu saksi RIFAL beserta terdakwa (FADLY) dan saksi RESKI menarik saksi korban (Pr. HASTUTI) kebawah jembatan, dan saat itu terdakwa (FADLY) mengancam saksi korban (Pr. HASTUTI) kalau berteriak dan melawan maka saksi korban (Pr. HASTUTI) akan dibuang ke kanal sehingga saksi korban (Pr. HASTUTI) pasrah dan tidak biasa berbuat apa-apa, dimana selanjutnya terdakwa (FADLY) membuka celana yang dipakai saksi korban (Pr. HASTUTI) kemudian saksi RIFAL yang pertama kali membuka celananya dan dengan posisi berdiri saksi RIFAL memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban (Pr. HASTUTI) sambil digoyang-goyangkan hingga saksi RIFAL merasakan kepuasan. Bahwa saat saksi RIFAL

menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI), terdakwa (FADLY) dan saksi RESKI memengang kedua tangan saksi korban (Pr. HASTUTI) sambil meremas-remas serta bergantian menciumi bibir saksi korban. Bahwa setelah saksi RIFAL menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) selanjutnya gantian terdakwa (FADLY) yang menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban (Pr. HASTUTI) begitupun selanjutnya setelah terdakwa (FADLY) menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) dilanjutkan oleh saksi RESKI. Bahwa saat saksi RESKI mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) tiba-tiba datang saksi MUSTARI yang memergoki perbuatan terdakwa (FADLY) dan saat itu saksi MUSTARI langsung berteriak dimana terdakwa (FADLY) beserta saksi RESKI dan saksi RIFAL melarikan diri. Bahwa berapa saat kemudian terdakwa (FADLY) dan kedua rekannya (RESKI dan RIFAL) tertangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi;

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan,
2. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Dakwaan Subsider

Kesatu : Bahwa ia terdakwa FADLI Bin RAHMAN bersama-sama dengan saksi RIFAL dan saksi MUH.RESKI, pada hari tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertemapat di Jl. Urip Sumoharjo Makassar tepatnya dibawah jembatan samping Wisma Benhil, atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum PN.Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya yaitu Pr.HASTUTI untuk bersetubuh dengannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, dimana selanjutnya saksi RIFAL menghentikan sepeda motor saksi korban lalu terdakwa menutup wajah saksi korban dengan menggunakan baju terdakwa, selanjutnya saksi RIFAL mengambil Hand Phone milik saksi korban begitupun Hand Phone yang berada di saku baju saksi korban sedang saksi RESKI mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi RIFAL beserta terdakwa dan saksi RESKI menarik korban kebawah jembatan, dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban kalau berteriak dan melawan maka saksi korban akan dibuang ke kanal sehingga saksi korban pasrah dan tidak bias berbuat apa-apa, dimana selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai saksi korban kemudian saksi RIFAL yang pertama kali membuka celananya dan dengan posisi berdiri saksi RIFAL memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil digoyang-goyangkan hingga saksi RIFAL merasakan kepuasan. Bahwa saat itu saksi RIFAL menyetubuhi saksi korban, saksi FADLI dan saksi RESKI memegang kedua tangan saksi korban sambil meremas-remas serta bergantian menciumi bibir saksi korban. Bahwa setelah saksi RIFAL menyetubuhi saksi korban selanjutnya gentian terdakwa yang menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban begitupun selanjutnya setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban dilanjutkan oleh saksi RESKI. Bahwa saat saksi RESKI mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi korban tiba-tiba dating saksi MUSTARI yang memergoki perbuatan terdakwa dan saat itu saksi MUSTARI langsung berteriak dimana terdakwa beserta saksi RESKI dan saksi RIFAL melarikan diri. Bahwa berapa saat kemudian terdakwa dan kedua rekannya tertangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Mappaodang Makassar No : VER/104/VII/2015/ Forensik tanggal 10 Juli 2015, yang

dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Mauluddin yang menerangkan sebagai berikut :

- Serambi kemaluan ditemukan luka lecet serta tampak kemerahan,
- Selaput dara ditemukan luka robek pada arah jam 3, jam 6, jam 11 sampai dasar dan tidak berdarah,
- Liang senggama ditemukan luka lecet pada bagian bawah,
- Hasil test kehamilan negative.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua Dakwaan Primer

Pertama : Bahwa ia terdakwa FADLY Bin RAHMAN,bersama-sama dengan saksi RIFAL dan saksi RESKI, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jl. Urip Sumohardjo Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, dengan cara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban HASTUTI, yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.

Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah

surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana, agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

- a. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis,
- b. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar,
- c. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti,
- d. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebutkan sumbernya.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa FADLI Bin Rahman, bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Pemerkosaan serta Pencurian yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan bunyi Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI Bin RAHMAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru kotak-kotak hitam,

- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu putih,
- 1 (satu) lembar sweater warna ungu,
- 1 (satu) lembar BH warna cream,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia,

Menetapkan agar bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia dikembalikan kepada saksi HASTUTI.

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisa Penulis

Hukum Pidana Materiil dapat juga disebut hukum pidana substantive (*substantive criminal law*). Substansial dari hukum pidana materiil (*ius ponale*) menyangkut tentang, perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana/tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan, sedangkan dipidananya si pembuat berdasarkan asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan).

Kasus yang penulis teliti diatur dalam KUHP. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan Subsider sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, di kenakan Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari perbuatan itu dapat di hukum, adalah sebagai berikut:

Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

a. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa FADLY Bin RAHMAN.

b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya;

Bahwa sesuai fakta persidangan dimana terdakwa (FADLY) telah menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) dengan cara terdakwa (FADLY) mengancam akan membuang saksi korban (Pr. HASTUTI) ke kanal/sungai jika saksi korban (Pr. HASTUTI) tidak mengikuti keinginan terdakwa (FADLY), dimana dengan terlebih dahulu saksi korban (Pr. HASTUTI) diseret kebawah jembatan, setelah itu posisi didudukkan diatas pipa besi terdakwa (FADLY) menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) dengan cara terdakwa (FADLY) memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban (Pr. HASTUTI) dan digoyang-goyangkan hingga terdakwa (FADLY) mendapatkan kepuasan dan mengeluarkan sperma.

Bahwa saat itu saksi korban (Pr. HASTUTI) disetubuhi secara bergantian dengan rekan terdakwa (RIFAL dan RESKI), dimana saat terdakwa (FADLY) menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) dua rekannya yang lainnya ada yang meremas payudara saksi korban (Pr. HASTUTI) dan juga ada yang menciumi bibir saksi korban (Pr. HASTUTI) , dan juga terdakwa (FADLY) memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi korban (Pr. HASTUTI) serta saksi RESKI memasukkan jari tangannya kedalam kelamin saksi korban (Pr. HASTUTI) .

c. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana terdakwa (FADLY), dimana pada saat saksi korban (Pr. HASTUTI) berada diatas motor dihentikan oleh terdakwa (FADLY) lalu terdakwa (FADLY) menutup mulut saksi korban (Pr. HASTUTI) menggunakan baju dan selanjutnya terdakwa

(FADLY) bersama dengan RIFAL DAN RESKI menyeret saksi korban (Pr. HASTUTI) kebawah jembatan dan dengan posisi berdiri saksi RIFAL yang pertama kali menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) dengan memasukkan kelamin terdakwa (FADLY) kedalam kemaluan saksi korban (Pr. HASTUTI), sedang saksi RESKI dan terdakwa (FADLY) bergantian meremas payudara serta menciumi bibir saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya.

Bahwa setelah terdakwa (FADLY) dilanjutkan oleh saksi RIFAL dan kemudian saksi RESKI juga menyetubuhi saksi korban (Pr. HASTUTI) dengan cara digoyang-goyangkan hingga terdakwa (FADLY) merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang penulis kutip pada putusan Nomor

167/Pid.Sus.Anak/PN.MKS berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-86 /R.4.10/Ep/07/2015.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi HASTUTI
- Saksi HASDIANA
- Saksi MUSTARI Alias TARI
- Saksi RIFAL Alias MANGUNI
- Saksi MUH.RESKI

Yang atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum dari Dokter No : VER/104/VII/2015/Forensik tanggal 10 Juli 2015, yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Majelis telah memperoleh fakta-fakta dari keterangan terdakwa yang selengkapanya di bawah sumpah bahwa semua yang didakwakan benar adanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu melanggar Pasal 285 Jo. dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangaanya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pidana sebagai mana terurai dalam amar putusan, dinilai Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan

perbuatannya serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma,
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik korban sebagai seorang Mahasiswa.

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa masih muda.

2. Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa FADLI Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan,
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun,
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu putih, 1 (satu) lembar sweater warna ungu, 1 (satu) lembar BH warna cream, dan 1 (satu) buah HP, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP merk Nokia dikembalikan kepada saksi HASTUTI,
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Analisa Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam

upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, pada waktu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis melakukan wawancara langsung kepada hakim yang memutus perkara ini, adapun hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, mengatakan bahwa :

“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dan pemerkosaan dengan kekerasan dan dihadapkan didepan persidangan berusia 15 tahun. Dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim setelah membaca dan memperhatikan surat akta kelahiran dan kantor catatan sipil Kota Makassar dimana terdakwa lahir pada tanggal 20 April 2000 maka usia terdakwa sekarang 15 tahun. Dimana hakim dalam memutuskan perkara tidak melihat dari usia anak melainkan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidanaaan tetapi untuk bagian

lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut;

1. penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus perampasan dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini merupakan dakwaan subsider, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS, telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur Pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa.

Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana namun untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak, akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut;

1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga

hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa anak.

2. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.
3. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2005. ***Tindak Pidana Mengenai Kesopanan***. Rajawali Pers : Jakarta.

-----, 2008. ***Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana***. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Amir Ilyas, 2012. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Mahakarya Rangkang Offset : Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1994. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Rineka Cipta : Jakarta.

Bambang Poernomo, 1982. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Ghailea Indonesia : Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2008. ***Pidana dan Pemidanaan***. Sinar Grafika : Jakarta.

Bunadi Hidayat, 2010. ***Pemidanaan Anak Di Bawah Umur***. PT. Alumni Bandung 2010 : Bandung.

Darwan Prinst, 1997. ***Hukum Anak Indonesia***. Citra Aditya Bakti Cet Ke-2 : Bandung.

Erdianto Efendi, 2011. ***Hukum Pidana Indonesia***. PT Refika Aditama : Bandung.

Frans Maramis, 2012. ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia***. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Kartini Kartono, 1992. ***Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja***. Rajawali : Jakarta.

Laden Marpaung, 2005. ***Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana***. Sinar Grafika : Jakarta.

Muhammad Joni, 1997. ***Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak***. Citra Aditya Bakti Cet Ke-5 : Bandung.

Soetodjo Wagiaty, 2010. ***Hukum Pidana Anak***. Refika Aditama : Bandung.

Undang-undang :

Kitab undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45, Pasal 285 – Pasal 288, Pasal 363- Pasal 365.

Kitab undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (3).

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Tentang Hak-hak Anak Tahun 1990.

Skripsi :

Didik wahyuni, 2006. ***Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.***

Nilam insani, 2011. ***Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak.***

Sumber lain :

<http://kompas.com>

<http://pikiran-rakyat.com>

<http://indonesia.com>